

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Henny Nuraeny, S. H. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika, 2022.
- Kencana Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. M Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, PD. Budi Chaniago, Jakarta Selatan, 2020.
- Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2020.
- Sutjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan Ke 6, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2019.
- Rifa'l Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka-Press, Yogyakarta, 2021
- Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

B. Jurnal

- Alfandi, Arham, Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian perangkat Desa Di desa Topejawa. Diss. Universitas Hasanuddin, Volume 13, Tahun 2021.
- Ayu Trisnawati, Gede Arya Sumerthayasa, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung. Jurnal, Volume 15 Tahun 2016.
- Beni Ahmad Sae, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam pemberhentian pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung. Jurnal, Volume 15 Tahun 2019.

- Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, Volume 89, Tahun 2020.
- Faturahman, B. M. Aktualisasi nilai demokrasi dalam perekrutan dan penjaringan Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, Volume 89, Tahun 2019.
- Noviati, Cora El. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." Jurnal konstitusi volume volume 10, Tahun 2018.
- Faerus, Implementasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2011 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep). Jurnal, Volume 9. Tahun 2019.
- Gadion, Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang). PERAHU, Volume 46 Tahun 2022.
- Gaffer Affan, Rasyid Saukani, Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan kesatuan Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Volume 172, Tahun 2003.
- Irma, et al. Implementasi Algoritma Multi Factor Evaluation Process pada Seleksi Pengangkatan Aparat Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika, Volume 16, Tahun 2022.
- Ismail, Muhammad, Widagdo, Ari Kuncara, Widodo, dan Agus. Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal ekonomi dan bisnis, Volume 34, Tahun 2016, Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan public, Unisri Pres, volume 101, Tahun 2020.
- Seleky, Adol Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, Kewenangan penetapan kerugian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. PATIMURA Legal Jurnal, Volume 44 2022.
- Supriadi, D. Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Studi di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Ilmiah, Volume 29. 2018

Ayu Gustami. Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Esensi Hukum, Volume 12, Tahun 2022.

Zulkarnain, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah, Volume 15 Tahun 2020

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa

D. Sumber lain

ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa Artikel,

<https://ombudsnan.go.id/>,(diakses pada :01 november 2023)

<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/pdf>, diakses pada 26

Desenber 2023, pukul 11.34 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_keKepalaan_di_Kabupaten_Kuningan diakses pada 30 Desenber 2023, pukul 11.34 WIB)